ABSTRAK

Notaris sebagai salah satu pejabat umum mempunyai peranan penting dalam menjamin kepastian, ketertiban dn perlindungan hukum melalui akta otentik yang dibuatnya oleh ataudi hadapannya. Perbuatan Melawan Hukum diartikan sebagai suatu perbuatan yang melanggarhukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tanggung jawab notaris atas akta yang dibatalkan oleh pengadilan pada Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 192/Pdt.G/2014/PN.Bwi. penelitian ini merupakan metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian terhadap hukum yang berada di dalam perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini menitikberatkan pada penelitian dokumen atau kepustakan yang intinya mencari teori-teori, pandangan yang mempunyai kolerasi dan relevan dengan permasalahan yang akan diteliti.

Tujuan penelitian untuk mengetahui dan memahami mengapa akta itu dapat dibatalkan, dan agar mengetahui dan memahami bagaimana tanggung jawab dan akibat hukum Notaris terhadap akta yang dibatalkan oleh pengadilan. Maka akta merupakan alat bukti yang kuat dan apabila terjadi sengketa di Pengadilan kecuali dapat dibuktikan ketidakbenarannya, sehingga akta Notaris memberikan suatu pembuktian yang sempurna.

Hasil penelitian bahwa menunjukan Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 192/Pdt.G/2014/PN.Bwi. yang membatalkan akta otentik yang dibuat oleh notaris karena akta notaris melakukan perbuatan melawan hukum sehingga merugikan pihak yang bersangkutan. Notaris tersebut telah melanggar asas kehati-hatian yaitu asas yang dibuat notaris karena terdapat pihak-pihak yang melakukan kejahatan seperti memberikan surat palsu dan keterangan palsu kedalam akta yang dibuat notaris. Sehingga untuk mencegah terjadinya kejahatan-kejahatan yang dapat menjerumuskan notaris terlibat dalam permasalahan hukum, perlu diatur kembali dalam Undang-Undang Jabatan Notaris tentang pedoman dan tuntunan notaris untuk bertindak lebih cermat, teliti dan hati-hati dalam proses pembuatan akta otentik. Bentuk pertanggungjawaban terhadap notaris yang melakukan perbuatan melawan hukum dalam pembuatan akta adalah seorang notaris dapat dikenakan biaya atau ganti rugi kepada pihak yang dirugikan atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan notaris. Pertanggungjawaban secara administratif berupa pemberian sanksi teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian dengan tidak hormat sebagai seorang notaris. Pertanggungjawaban terhadap kode etik profesi Notaris berupa pemberian sanksi teguran, peringatan, pemecatan sementara (schorsing), pemecatan (onzetting) dan pemberhentian dengan tidak terhormat dari keanggotaan perkumpulan. Akibat hukum dari pembatan itu ialah perbuatan hukum tersebut tidak mempunyai akibat hukum sejak terjadinya pembatalan, dan pembatalan atau pengesahan perbuatan hukum tersebut tergantung pada pihak tertentu, yang menyebabkan perbuatan hukum tersebut dapat dibatalkan.

Kata Kunci: Pembatalan Akta, Notaris, Hakim

ABSTRACT

A notary as one of the public officials has an important role in ensuring certainty, order and legal protection through authentic deeds made by him or before him. Unlawful acts are interpreted as an act that violates written law or unwritten law.

This study aims to examine the notary's responsibility for the deed canceled by the court in the Decision of the Banyuwangi District Court Number 192 / Pdt.G / 2014 / PN.Bwi. This research is a normative juridical research, namely research on the law that is in law that applies in Indonesia. This research focuses on document research or literature which essentially seeks theories, views that have collaboration and are relevant to the problems to be studied.

The results of the study showed that the decision of the Banyuwangi District Court Number 192 / Pdt.G / 2014 / PN.Bwi. canceling an authentic deed made by a notary because the notary deed commits an unlawful act that harms the party concerned. The notary has violated the principle of prudence, namely the principle made by the notary because there are parties who commit crimes such as giving fake letters and false information into the deed made by a notary. So that to prevent the occurrence of crimes that can plunge the notary involved in legal matters, it needs to be re-arranged in the Act of Notary Position concerning the guidance and guidance of the notary to act more carefully, thoroughly and carefully in the process of making authentic deeds. The form of accountability to a notary who commits an unlawful act in the making of a deed is a notary may be charged a fee or compensation to the injured party for an unlawful act committed by the notary. Administrative accountability in the form of sanctions for verbal reprimand, written warning, temporary dismissal, dismissal with respect and disrespectful dismissal as a notary. Accountability for the Notary's professional code of ethics in the form of sanctions for reprimand, warning, temporary dismissal, dismissal (onzetting) and dishonorable dismissal from association membership. The legal effect of the blocking is that the legal action does not have legal consequences since the cancellation, and the cancellation or ratification of the legal action depends on the particular party, which causes the legal action to be canceled. And the legal consequences that occur after the issuance of a decision regarding the cancellation of the Deed, the Deed has no legal force and cannot be a perfect proof of the parties who make the authentic deed

Keywords: Cancellation of Deed, Notary, Judge